

## INTISARI

Sinergi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah diperlukan agar program lingkungan berbasis komunitas berjalan efektif dan berkelanjutan. ProKlim Kampung Rawajati menjadi unit analisis karena mampu memotret fenomena kolaborasi multipihak dalam upaya adaptasi dan mitigasi iklim di tingkat lokal.

Penelitian ini menggunakan perspektif *collaborative governance* dari Ansell & Gash (2007) yang dikembangkan lebih lanjut oleh Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012). Kerangka ini dioperasionalkan menjadi empat tahap tata kelola kolaboratif, yakni pembentukan visi bersama, partisipasi, jejaring, dan kemitraan, untuk melihat proses kolaborasi dalam ProKlim mencerminkan prinsip deliberatif, inklusif, dan adaptif.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, berlokasi di RW 03 Kampung Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan delapan informan kunci (Dinas LH Jakarta dan Suku Dinas LH Jakarta Selatan, PT Astra International, Ketua RW/ProKlim, penggerak/kader lingkungan, dan masyarakat umum) serta observasi partisipatif. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengacu pada kerangka *collaborative governance* untuk mengidentifikasi proses kolaborasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *collaborative governance* pada ProKlim di Rawajati belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *collaborative governance* yang utuh. Visi bersama masih bersifat *top-down*, partisipasi masyarakat dominan pada tahap pelaksanaan tetapi minim dalam perencanaan dan evaluasi, jejaring lintas aktor berjalan *ad-hoc* dan belum terlembaga, sementara kemitraan masih hierarkis dengan swasta berperan terbatas sebagai fasilitator teknis. Dengan demikian, untuk tercapainya *collaborative governance* pada ProKlim di Rawajati perlunya pelembagaan forum kolaboratif lintas aktor yang deliberatif dan berkelanjutan agar visi, partisipasi, jejaring, dan kemitraan dapat berjalan lebih setara dan inklusif.

**Kata Kunci:** Program Kampung Iklim, Collaborative Governance, Kemitraan Multipihak, Partisipasi Komunitas

## ABSTRACT

Synergy between communities, the private sector, and the government is needed to ensure that community-based environmental programs are effective and sustainable. The Climate Village Program (ProKlim) in Kampung Rawajati is chosen as the case study because it illustrates multi-stakeholder collaboration in local climate adaptation and mitigation.

This research applies the collaborative governance perspective of Ansell & Gash (2007), further developed by Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012). The framework is used through four stages, which are joint visioning, participation, networking, and partnership, to examine whether ProKlim reflects deliberative, inclusive, and adaptive principles.

A qualitative descriptive method was used in RW 03, Kampung Rawajati, Pancoran, South Jakarta. Data were collected through interviews with eight key informants (government agencies, private sector, community leaders, environmental cadres, and residents) and participatory observation. Thematic analysis was conducted with reference to the collaborative governance framework.

The findings show that collaborative governance in ProKlim Rawajati is not yet fully realized. The vision is mostly top-down, participation is strong in implementation but weak in planning and evaluation, networks are ad-hoc and not institutionalized, and partnerships remain hierarchical with the private sector acting mainly as a technical facilitator. To strengthen collaborative governance, an institutionalized, cross-actor forum is needed to ensure visioning, participation, networking, and partnership are more equal and inclusive.

**Keywords:** Climate Village Program, Collaborative Governance, Stakeholder Partnership, Community Participation